

# ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP MENDUKUNG SIAK HIJAU

Hasil Review Kebijakan RPJMD Siak Tahun 2021-2026

---

Penulis

**Triono Hadi**

Reviewer

**Usman**

## A. PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SIAK

Komitmen Pemerintah Kabupaten Siak terhadap pembangunan lingkungan hidup tertuang kedalam kebijakan Siak Kabupaten Hijau, kebijakan dilahirkan sebagai upaya untuk mendorong kelestarian dan berkelanjutan dalam pemanfaatan Sumberdaya Alam (SDA), serta peningkatan ekonomi masyarakat. Pada periode 2018-2021 kebijakan Siak Hijau tertuang dalam Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2018, kemudian pada saat ini kebijakan Siak Hijau diubah dan ditingkatkan statusnya melalui Peraturan Daerah No. 4 tahun 2022 tentang Siak Kabupaten Hijau.

Secara umum kebijakan Siak Hijau mencakup tiga tujuan yaitu pengelolaan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat dengan prinsip kelestarian dan berkelanjutan, pemanfaatan sumberdaya alam untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli daerah, serta pola pemanfaatan sumber daya alam daerah dilakukan melalui kegiatan konservasi, hilirisasi dan intensifikasi.

Kemudian melalui kebijakan RPJMD Kabupaten Siak tahun 2021-2026, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Siak Hijau sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan Siak Hijau menjadi salah satu rujukan dalam proses penyusunan kebijakan RPJMD tersebut, artinya pemerintah daerah dalam menetapkan program dan indikator pembangunan lingkungan hidup harus selaras dengan arah kebijakan Siak Hijau, sesuai masing-masing urusan sektoral yang ter-

kait, sebagaimana tertuang dalam BAB II RPJMD Siak 2021-2026.

Siak Kabupaten Hijau diuraikan sebagai bagian dari isu strategis pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD periode 2021-2026, yang disebut sebagai pembangunan Kabupaten Hijau, meliputi: (1) Mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan hidup, (2) Penyediaan infrastruktur dasar ekonomi, (3) Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, (4) Penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut, (5) Komitmen pembangunan berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan dalam bentuk konservasi, dan (6) Percepatan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Siak tidak terlepas persoalan bencana alam seperti banjir, abrasi pantai dan sungai, serta kebakaran hutan dan lahan yang cenderung terjadi setiap tahunnya, hal ini disebabkan sebagian besar wilayah di Kabupaten Siak di dominasi lahan gambut. Kondisi ini secara tidak langsung sangat mempengaruhi lambatnya perkembangan pembangunan daerah, khususnya pembangunan lingkungan hidup terutama pada urusan sektoral mendukung pencapaian Siak Hijau.

Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Siak tidak terlepas persoalan bencana alam seperti banjir, abrasi pantai dan sungai, serta kebakaran hutan dan lahan yang cenderung terjadi setiap tahunnya, hal ini disebabkan sebagian besar wilayah di Kabupaten Siak

di dominasi lahan gambut. Konsisi ini secara tidak langsung sangat mempengaruhi lambatnya perkembangan pembangunan daerah, khususnya pembangunan lingkungan hidup terutama pada urusan sektoral mendukung pencapaian Siak Hijau.

Isu strategis dan permasalahan lingkungan hidup di Siak sesuai dengan hasil identifikasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten Siak, diantaranya; 1) Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) pangan dan air yang belum optimal untuk kebutuhan lahan, 2) Peningkatan jumlah sampah dan lumpur tinja serta pengelolaannya yang belum optimal, 3) Peningkatan potensi beban pencemar yang berpengaruh pada kualitas air sungai, 4) Efisiensi pengaturan tata air yang belum optimal terutama di kawasan resapan air, 5) Perlunya perlindungan dan pengelolaan fungsi ekosistem khususnya pada ekoregion Dataran Gambut; 6) Perlunya peningkatan ketahanan

keanekaragaman hayati di hutan, 7) Perlunya upaya pengurangan resiko bencana akibat perubahan iklim, khususnya kebakaran hutan dan lahan, dan 9) Perlunya peningkatan kapasitas adaptasi terhadap bencana di seluruh Kabupaten Siak.

Melihat dari pola pemanfaatan lahan di Kabupaten Siak secara total mencapai 825,983 hektar, penggunaan kawasan cukup luas digunakan untuk lahan perkebunan mencapai 49% atau seluas 412.116 hektar, kawasan hutan sebesar 38 persen atau seluas 319.155 hektar, lahan terbuka hijau seluas 75.476 hektar atau 9,1 persen dari luasan daratan Kabupaten Siak, dan sisanya kurang dari dua persen berupa jenis tutupan lahan lainnya yang tersebar di Kabupaten Siak seperti; kawasan pemukiman, sawah, industri, belukar, dan rawa. Berikut rincian kawasan pemanfaatan lahan di Kabupaten Siak.

**Tabel;** Luas Kawasan Penggunaan Lahan di Kabupaten Siak Tahun 2020

Peruntukan Lahan	Luas (Ha)	Proporsi (%)
Lahan Belukar	1.241,99	0,15
Hutan	319.155,90	38,6
Industri	622,92	0,07
Kawasan Minyak	637,28	0,07
Permukiman	9.637,77	1,16
Lahan Terbuka	75.476,71	9,13
Perkebunan	412.116,71	49,8
Lahan Rawa	5.059,51	0,61
Lahan Sawah	2.034,49	0,24
<b>Total</b>	<b>825.983,28</b>	<b>100</b>

Sumber; RPJMD Siak Tahun 2021-2026

Salah satu faktor yang mendorong lahirnya kebijakan Siak Hijau adalah untuk penataan kawasan hutan yang selama ini banyak menimbulkan permasalahan, diantaranya kebakaran hutan, konflik dan ketimpangan penguasaan lahan yang didominasi perusahaan industri kehutanan, serta pemanfaatan lahan untuk perkebunan yang berlebihan. Melihat dari pola pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Siak, penggunaan kawasan hutan

Upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah melalui pemanfaatan kawasan pertanian pangan yang berkelanjutan, hal ini sejalan dengan tujuan Siak Kabupaten Hijau yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan pola pemanfaatan lahan yang lestari. Untuk mendukung perluasan pemanfaatan lahan pertanian pangan pemerintah daerah menetapkan potensi kawasan pertanian pangan

**Tabel;** Area Penggunaan Kawasan Hutan dan Perkebunan Kabupaten Siak

No	Uraian	Luas (Ha)	Lokasi
1	<b>Kawasan Hutan</b>		
	Hutan Produksi	12.318,80	Kecamatan Sungai Apit, mempura, dayun, Minas Kandis, Tualang, siak, dan Koto Gasib
Hutan Tanamam Industri	329.110,22		
2	<b>Kawasan Perkebunan</b>		
	Perkebunan Besar Swasta	238.550,95	Kecamatan Sungai Apit, mempura, dayun, Minas Kandis, Tualang, siak, dan Kotogasib
	Perkebunan Rakyat	76.895,20	
	Cadangan lahan pengembangan perkebunan/tanaman Tahunan	18.115,88	

Sumber; RPJMD Siak Tahun 2021-2026

cukup luas digunakan untuk kawasan hutan industri mencapai 329.110 hektar, sedangkan hutan produksi hanya seluas 12,318 hektar. Begitu juga dengan kawasan perkebunan cukup luas digunakan untuk kawasan perkebunan dalam skala besar yang didominasi perusahaan swasta, sedangkan untuk perkebunan rakyat hanya seluas 76,895 hektar.

berkelanjutan seluas 4.191 hektar dan lahan cadangan pertanian seluas 109 hektar yang tersebar di lima Kecamatan yaitu; Kecamatan Bunga Raya, Sabak Auh, Sungai Apit, Sungai Mandau dan Pusako.

**Tabel;** Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Siak Tahun 2019

No	Alokasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Luas Potensi Lahan Pertanian Pangan		Kecamatan
		(Ha)	(%)	
1	Lahan Pertanian pangan berkelanjutan	4.191	97,46	Bunga Raya, Sabak Auh, Sungai Apit, Sungai Mandau dan Pusako
2	Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan	109	2,54	Bunga Raya, Koto Gasib dan Mempura

Sumber; RPJMD Kabupaten Siak 2021-2026

Selain dari upaya penyelamatan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, di Kabupaten Siak masih cukup tinggi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, bahkan merupakan daerah yang rawan akan terjadinya karhutla. Kondisi ini tidak terlepas dari kondisi lahan di Kabupaten Siak yang sebagian besar merupakan lahan gambut mencapai lebih dari 50% dari total luasan daratan. Kebakaran hutan dan lahan tersebut terjadi hampir disebagian besar wilayah perkampungan di Kabupaten Siak, yaitu terdapat 73 Kampung yang rawan terjadi karhutla (Data BPBD Siak, 2019). Perkembangan kebakaran hutan dalah lahan di Kabupaten Siak sejak tahun 2016 terjadi di 26 titik kebakaran, terus meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2019 mencapai 379 titik hotspot, kemudian pada tahun 2020 dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dapat menurunkan jumlah kebakaran menjadi 50 titik hotspot.

**B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP**

Pemerintah Kabupaten Siak telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Dokumen tersebut sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan selama lima tahun kedepan, dalam proses penyusunannya melalui misi ke lima yaitu pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan, misi ini memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan Siak Hijau, yang menyelaraskan program pembangunan daerah dengan indikator Siak Hijau, seperti program penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup dan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui misi ke lima tersebut, upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang lingkungan hidup yang berkelanjutan, yang dijabarkan untuk mendukung Siak Hijau. Terdapat dua sasaran pembangunan lingkungan hidup yaitu 1) Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup, dan 2) Menurunnya tingkat kebakaran hutan dan lahan. Masing-masing sasaran tersebut terdapat enam strategi dan delapan arah kebijakan untuk mencapai pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Siak, rincian arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup di uraikan dalam table berikut ini.

**Tabel;** Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Siak

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Pengelolaan Pertanahan	Pengendalian Pemanfaatan Ruang
	Peningkatan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau	Menyediakan Ruang Terbuka Hijau
	Peningkatan Pengelolaan, Air Limbah, Persampahan dan Lingkungan Hidup.	Menambah Penyediaan IPAL Komunal
		Menyediakan Tempat Pembuangan Sampah
Pelaksanaan Tranfer Anggaran Yang Pro Lingkungan	Menurunkan Indeks Pencemaran Air dan Udara	Tranfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE)

Menurunnya Tingkat Kebakaran Lahan dan Hutan	Pemasyarakatan Teknik Ramah Lingkungan dalam Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan	Meningkatkan Sosialisasi Teknik Ramah Lingkungan dalam Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan
	Peningkatan Partisipasi Multipihak dalam Mengatasi Kebakaran Lahan dan Hutan.	Meningkatkan Koordinasi Multi Pihak dalam Mengatasi Kebakaran Lahan dan Hutan

Sumber; RPJMD Siak 2021-2026

Untuk mendukung pencapaian sasaran, dan arah kebijakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, terdapat dua indikator utama yaitu; Indek kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang dihitung dari indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan, dan Tingkat kebakaran hutan dan lahan yang dihitung dari jumlah titik hotspot. Indikator kinerja lingkungan hidup ter-

**Target Kinerja Lingkungan Hidup Tahun 2021-2016**

Pemerintah Kabupaten Siak melalui kebijakan RPJMD 2021-206 menetapkan target kinerja lingkungan hidup meningkat cukup signifikan, seperti pada target indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2026 mencapai 69,66.

**Tabel;** Perkembangan Pengukuran Indek Kualitas Tutupan Lahan dan Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Siak Tahun 2017-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2017	2018	2019	2020
1	Pengukuran Indek Kualitas Tutupan Lahan	Hektar	49,60	49,60	55,16	52,38
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	Titik Api	76	343	372	50

Sumber; RPJMD Siak tahun 2021-2026

sebut yang sangat berkaitan dengan Siak Hijau yaitu indeks tutupan lahan yang dihitung dari luasan lahan yang berhutan. Perkembangan dari 2017-2020 Indek kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Siak terus meningkat sampai tahun 2020 mencapai 52,38, begitu juga dengan tingkat kebakaran hutan yang terjadi penurunan pada tahun 2020 menjadi 20 titik karhutla.

Sedangkan untuk target penurunan Karhutla dari kondisi awal tahun 2021 seluas 234,7 hektar ditargetkan menurun hingga tahun 2026 mencapai 150 hektar. Target penurunan karhutla pada periode sebelumnya ditetapkan dalam satuan titik api/hotspot, ini menunjukkan upaya untuk mencegah terjadinya karhutla semakin terukur dan akurat.

Untuk mendukung pencapaian target kinerja tersebut, khususnya dalam mendukung peningkatan indeks kualitas lingkungan dan penurunan kebakaran hutan, pemerintah perlu menyusun program kegiatan dan indikator kinerja yang terukur setiap tahunnya.

dup yang berkelanjutan atau Siak Hijau, terdapat sembilan program yang relevan mendukung pencapaian Siak Hijau, yang akan dilaksanakan oleh tiga OPD utama yaitu Dinas Penataan Ruang dan PUPR terdapat satu program, Dinas Lingkungan Hidup terdapat

**Tabel;** Target Kinerja Pembangunan Lingkungan Hidup (Siak Hijau) Tahun 2021-2026

Sasaran Program	Indikator (satuan)	Kondisi Awal 2021	Target Akhir 2026
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH (%)	67,76	69,66
Sasaran: Menurunnya Tingkat Kebakaran Lahan dan Hutan	Luas Lahan Terbakar (Ha)	234,7 ha	150,0 ha

Sumber; RPJMD Siak 2021-2026

Berdasarkan penjabaran misi kelima yang bertujuan untuk pembangunan lingkungan hi-

enam program dan Badan Penanggulangan Bencana terdapat dua program.

**Tabel;** Uraian Program Prioritas Pembangunan Lingkungan Hidup (Siak Hijau) 2021-2026

Program Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2021	Target Akhir 2026	OPD
Indikator; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penataan Ruang	55,24	67%	Dinas PUPR
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Luas Ruang Terbuka Hijau yang Tersedia	65%	75%	Dinas LH
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun	65%	100%	Dinas LH
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Data Kualitas dan Konservasi Lingkungan	80%	88%	Dinas LH
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah Perolehan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	80%	90%	Dinas LH
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang Ditanggapi	100%	100%	Dinas LH

Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	67%	75%	Dinas LH
Indikator: Menurunnya Tingkat Kebakaran Hutan dan Lahan				
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga yang Mempeloleh Informasi Rawan Bencana	10%	35%	BPBD
Program Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Kasus Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	61%	77%	BPBD

Ketiga OPD tersebut merupakan bagian dari urusan sektoral yang ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan Siak Hijau, sesungguhnya jika mengacu pada rencana aksi atau roadmap Siak Hijau yang telah ditetapkan sebelumnya terdapat 11 OPD yang terkait untuk melaksanakan Siak Hijau. Namun dalam analisis ini dibatasi pada OPD yang berkaitan langsung pada pelaksanaan misi kelima Bupati Siak tersebut, yang selaras dengan pencapaian tujuan dan indikator Siak Hijau.

### **Komitmen Siak Hijau Dalam Kebijakan RPJMD Siak 2021-2026**

Hasil identifikasi isu-isu strategis daerah yang diuraikan dalam kebijakan RPJMD tahun 2021-2026, ditemukan belum semua rencana aksi Siak Hijau dapat tercapai pada tahun 2021, padahal tahun tersebut yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan rencana aksi hijau sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang roadmap Siak Hijau.

Hal ini sangat dipengaruhi karena kondisi pandemi yang sangat menghambat perekonomian daerah sehingga terjadinya penurunan pendapatan daerah, dan berdampak pada pembiayaan program pembangunan terutama untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan ekonomi masyarakat sesuai tujuan Siak Hijau.

Pencapaian Siak Hijau sebagaimana telah uraikan sebelumnya, secara jelas telah dimasukan kedalam misi pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui misi ini dapat diidentifikasi terkait strategi dan arah kebijakan pembangunan Siak Hijau dapat diselaraskan dalam pembangunan daerah, yaitu terdiri dari tujuh strategi dan sembilan arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup yang mendukung capaian Siak Kabupaten Hijau, lebih rinci strategi dan arah kebijakan diuraikan sebagai berikut;

**Tabel;** Tabel; Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup mendukung Siak Hijau

Strategi	Arah Kebijakan
- Peningkatan Pengelolaan Pertanahan	- Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Peningkatan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau	- Menyediakan Ruang Terbuka Hijau
- Peningkatan Pengelolaan, Air Limbah, Persampahan dan Lingkungan Hidup.	- Menambah Penyediaan IPAL dan Komunal
- Pemasyarakatan Teknik Ramah Lingkungan dalam Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan	- Menyediakan Tempat Pembuangan Sampah (TPS)
- Peningkatan Partisipasi Multipihak dalam Mengatasi Kebakaran Lahan dan Hutan.	- Menurunkan Indeks Pencemaran Air dan Udara
- Peningkatan Benda/Kawasan Cagar Budaya Yang Dilakukan Restorasi	- Meningkatkan Sosialisasi Teknik Ramah Lingkungan dalam Pengendalian Lahan dan Hutan.
- Pelaksanaan Transfer Anggaran yang Pro Lingkungan	- Meningkatkan Koordinasi Multi Pihak dalam Mengatasi Kebakaran Lahan dan Hutan.
	- Meningkatkan Peran Dunia Usaha dan Pemerintah Pusat dalam Melakukan Restorasi Kawasan Cagar Budaya
	- Tranfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE)

Untuk mempercepat Implementasi Siak Hijau, pemerintah daerah perlu mengacu pada tiga pendekatan, diantaranya; 1) pendekatan kebijakan yaitu mengarahkan semua kebijakan daerah dapat mendukung Siak Hijau, 2) Pendekatan Landscape dan Pengelolaan Terbaik yaitu dengan cara mendorong inisiatif-inisiatif pengelolaan SDA secara berkelanjutan dan ramah lingkungan; dan 3) Pendekatan Ekonomi yaitu memberi ruang partisipasi dan memfasilitasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan SDA yang mendapatkan manfaat ekonomi.

### C. PROYEKSI ANGGARAN Mendukung SIAK HIJAU TAHUN 2021-2026

Kondisi pandemi yang masih terjadi sampai saat ini sangat mempengaruhi kondisi keuangan daerah, disatu akan berdampak pada menurunnya sejumlah target pendapatan daerah, dan disisi lainnya sejumlah program prioritas daerah tidak dapat dibiayai secara termasuk pembiayaan program dan kegiatan

yang mendukung pencapaian siak hijau daerah, dan disisi lainnya sejumlah program prioritas daerah tidak dapat dibiayai secara termasuk pembiayaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian siak hijau. Disamping itu, kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Siak waktu mendatang tahun dari tahun 2022-2026 justru diproyeksikan terus meningkat, dengan asumsi semakin membaiknya perekonomian daerah, tentunya kondisi ini sangat membantu perekonomian daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Siak dalam priode 2021-2026 ditargetkan meningkat setiap tahunnya. Pendapatan daerah dari kondisi awal tahun 2021 sebesar Rp 1,8 triliun di targetkan meningkat dalam lima tahun kedepan pada tahun 2026 mencapai Rp 2,2 triliun. Begitu juga dengan belanja daerah dari kondisi awal sebesar Rp 2,03 triliun meningkat pada tahun 2026 mencapai Rp 2,27 triliun, sejalan dengan

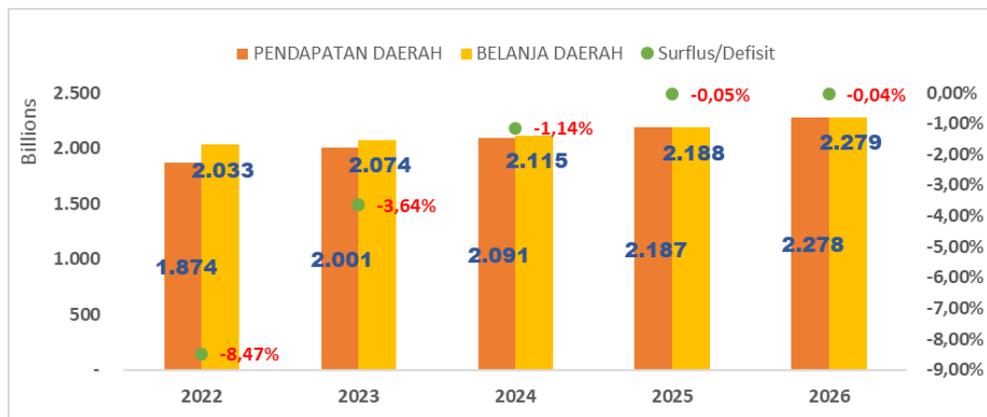
itu Silpa daerah juga diproyeksikan dengan menurun hingga angka ideal yaitu sebesar 0,04 persen.

Meskipun pemerintah Kabupaten Siak dapat mengasumsikan terjadinya peningkatan pendapatan daerah, namun melihat kapasitas fiskal daerah yang semakin sempit karna sudah terbebani dengan program-program mandatori

pus sebagai program kegiatan yang justru diharapkan masyarakat.

Berdasarkan penelusuran program dan anggaran dari penjabaran misi kelima Bupati Siak tersebut yang berkaitan dengan pencapaian Siak Hijau, pemerintah memproyeksikan alokasi anggaran pembangunan lingkungan hidup atau Siak

**Grafik;** Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026

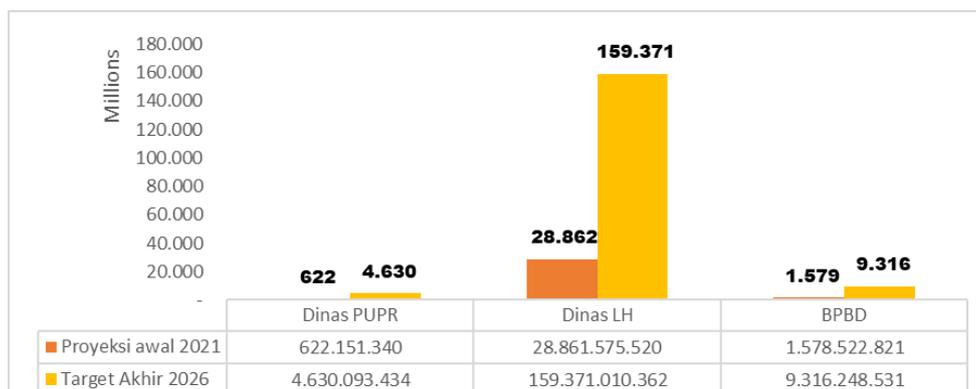


Sumber; Dokumen RPJMD Siak 2021-2026

sebagaimana diatur melalui Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang sistem perencanaan pembangunan daerah. Maka dari itu, pemerintah dapat memproyeksikan belanja daerahnya seideal mungkin dan diarahkan untuk program prioritas daerah. Disamping itu, perlu mendorong skema pendanaan alternatif guna untuk mengatasi ketika pendapatan daerah tidak sesuai target yang ditetapkan, selama ini jika pendapatan daerah tidak tercapai sesuai target pemerintah lebih memilih untuk merubah skema belanja dengan mengha-

Hijau meningkat cukup signifikan, dari kondisi awal tahun 2022 sebesar Rp31 milyar diproyeksikan meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2026 mencapai Rp173 milyar. Alokasi anggaran tersebut untuk mendukung pencapaian dua indikator kinerja yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penurunan kemiskinan, yang akan dilaksanakan oleh tiga OPD terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penataan Ruang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

**Grafik;** Proyeksi Anggaran Mendukung Siak Hijau Tahun 2021-2026, Berdasarkan penjabaran misi kelima; mewujudkan Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan



**Sumber;** Proyeksi Anggaran dalam RPJMD Siak 2021-2026

Secara lebih rinci, uraian program prioritas pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan atau Siak Hijau, untuk mendukung indikator IKLH terdapat enam program yaitu; penyelenggaraan Penataan Ruang, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Perencanaan Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penghargaan Lingkungan

Hidup untuk masyarakat, Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Persampahan. Sedangkan untuk mendukung indikator penurunan kebakaran hutan dan lahan terdapat dua program yaitu; Program Penanggulangan Bencana, dan Program Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran.

**Grafik;** Uraian Program, Indikator dan Proyeksi Anggaran Mendukung Siak Hijau Berdasarkan penjabaran Misi; Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan (Siak Hijau) Tahun 2021-2026

Program Prioritas	Proyeksi 2021	Target Akhir 2026
<b>Indikator; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>		
Program penyelenggaraan Penataan Ruang	622.151.340	4.630.093.434
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	10.146.946.500	61.636.735.830
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	370.733.000	1.287.199.000
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	522.292.000	1.424.718.880
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	129.819.160	204.841.543
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	65.064.000	184.064.000
Program Pengelolaan Persampahan	17.626.720.860	94.633.451.109
<b>Indikator; Menurunnya Tingkat Kebakaran Hutan dan Lahan</b>		
Program Penanggulangan Bencana	803.040.400	6.379.274.230
Program Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	775.482.421	2.936.974.301
<b>Total</b>	<b>31.062.249.681</b>	<b>173.317.352.327</b>

## D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait perkembangan implementasi kebijakan Siak Hijau hingga tahun 2021 dan proyeksi pembangunan lingkungan hidup (Siak Hijau) hingga tahun 2026, yaitu; sebagai berikut;

- Melalui kebijakan RPJMD Kabupaten Siak tahun 2021-2026, kebijakan Siak Hijau secara eksplisit telah dimasukkan melalui misi kelima Bupati Siak yaitu mewujudkan pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan. Selain itu, kebijakan Siak Hijau yang saat ini telah di tingkatkan statusnya melalui Perda No. 4 tahun 2022 menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Siak.
- Arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup yang mendukung pencapaian Siak Kabupaten Hijau telah tertuang kedalam sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yaitu pada dua sasaran pembangunan seperti; peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dan penurunan kebakaran hutan dan lahan.
- Pemerintah Kabupaten Siak melalui kebijakan RPJMD 2021-2026 menetapkan target kinerja lingkungan hidup meningkat cukup signifikan, seperti pada target indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2026 mencapai 69,66. Sedangkan untuk target penurunan Karhutla dari kondisi awal tahun 2021 seluas 234,7 hektar ditargetkan menurun hingga tahun 2026 mencapai 150 hektar.
- Komitmen Siak Hijau menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan RPJMD Siak Hijau, sebagaimana tertuang dalam penjabaran visi misi bupati, penjabaran sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Siak.
- Proyeksi anggaran dalam lima tahun kedepan pada periode 2021-2026 diproyeksikan terus meningkat, artinya pemerintah daerah semakin optimis dapat mengejar target perekonomian daerah yang semakin membaik meskipun masih dalam kondisi pandemi covid.
- Alokasi belanja untuk mendukung Siak Hijau khususnya pada misi kelima yaitu pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan, diproyeksikan alokasinya meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2026 mencapai Rp173 milyar dari tiga OPD terkait.

## 2. Rekomendasi

Melalui kajian ini, Fitra Riau kepada pemerintah daerah Kabupaten Siak dalam upaya percepatan pembangunan lingkungan hidup (Siak Hijau), sebagai berikut;

- Pemerintah daerah secara berkelanjutan tetap pada menjalankan program prioritas daerah dalam mendukung kebijakan Siak Hijau, sekaligus menyediakan anggaran yang memadai khususnya terhadap program dan kegiatan yang relevan mendukung kebijakan Siak Hijau, terutama pada OPD terkait.
- Pemerintah daerah dapat meningkatkan alokasi anggarannya dalam upaya mendukung implementasi Siak Hijau, dengan melakukan penyesuaian indikator program pembangunan daerah dengan indikator Siak Hijau, sehingga program dan kegiatan yang ditetapkan tersebut relevan mendukung kebijakan Siak.
- Potensi pendanaan yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mendukung Siak Hijau yaitu melalui pemanfaatan sisa DBH DR yang masih terdapat di kas daerah hingga saat ini.
- Penerapan skema transfer anggaran dari Kabupaten ke kampung atau TAKE Siak Hijau dapat ditingkatkan setiap tahunnya, dan/atau dengan pendetakan insentif lainnya untuk mensinergikan pembangunan lingkungan hidup antara Kabupaten dan kampung di Kabupaten Siak.
- Upaya untuk percepatan implementasi Siak Hijau, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama pembangunan daerah dengan lintas pemerintah dan lintas sektor (Privat Sektor) untuk mendukung pencapaian tujuan Siak Hijau, apalagi kewenangan daerah Kabupaten/Kota semakin terbatas, khususnya dalam pengelolaan kehutanan.



### Social Media

 @FitraProvinsiRiau

 Fitra Provinsi Riau

 Fitra Riau

### Kontak

*sekretariat.fitrariau@gmail.com*

- Email

*www.fitrariau.org*

- Website